

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Amarullah Aman, Febri Yuliani, dan Chalid Sahuri

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Policy Implementation, Regional Staffing Services. This study aims to determine the implementation of the administration system management policy for the regional personnel services of Siak Regency. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data is obtained directly through interviews from key informants, namely the Head of the Regional Personnel Agency, Head of Staff Administration, Head of the Sub-Section, Head of the Welfare Sub-Sector and Civil Servants. Secondary data obtained from research documents. The results of the study indicate that there are results achieved from the application of Government Policy No. 31 of 2009 in the field of information and communication technology. This success is also supported by factors that influence the policy, starting from the communication factor supporting the successful implementation of Government Regulation Number 31 of 2009 in the Siak Regency Regional Civil Service Agency, but from the resource factor it is still inadequate in implementing the government regulation policy. Likewise from the implementing attitude factors and bureaucratic structure factors.

Key words: policy implementation, employee service

Abstrak: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kepegawaian Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan sistem administrasi pelayanan kepegawaian Daerah Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *key informan*, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian, Kepala Subbidang Kepangkatan, Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Pegawai Negeri Sipil. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hasil yang dicapai dari penerapan Kebijakan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 bidang teknologi informasi dan komunikasi. Keberhasilan ini juga didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, mulai dari faktor komunikasi mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, namun dari faktor sumberdaya masih kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah tersebut. Demikian pula dari faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pelayanan kepegawain

PENDAHULUAN

Peranan *Information Technology* (IT) *governance* tidaklah diragukan lagi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang mengadopsinya, seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya pada organisasi publik. Sebab IT Governance pada intinya adalah melakukan bagaimana memanajemeni penggunaan teknologi informasi agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan dan membantu proses pemecahan masalah. Prinsip-prinsip IT Governance harus dilakukan

secara terintegrasi, sebagaimana fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan secara sistemik pada sebuah organisasi publik. (Prosending Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2006).

Semakin mendesaknya implementasi ICT yang dibarengi dengan IT Governance pada organisasi publik, juga direspon positif oleh pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E-

Government). Dimana Peraturan Pemerintah ini diterapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Selain itu juga disebutkan pada pasal 2, tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah :

1. Memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan e-government secara nasional.
2. Menciptakan sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah secara nasional dalam penyelenggaraan e-government.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan e-government dalam pelayanan publik secara nasional
4. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Rendahnya kualitas pelayanan kepegawaian merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan kepegawaian di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimanakah pelaksanaan teknologi informasi dalam pelayanan sistem administrasi kepegawaian Daerah Kabupaten Siak. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut

Grindle (1980) berpendapat bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Lester, et al, dalam Sujianto (2008) mengemukakan, implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil, dan sebagai suatu akibat.

Menurut Nugroho (2004) konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun suatu dampak (outcome).

Edward III (1980) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurutnya ada empat, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan informan, terdiri dari Kabid Kepegawaian, Subid kepangkatan, Pegawai Dinas Komunikasi, Pegawai urusan kenaikan pangkat, PNS/ASN Kecamatan Minas, Pegawai Subag Umum, dan PNS/ASN bagian pelayanan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL

Implementasi Kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan penataan sistem administrasi pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak dimana diyakini mampu menekan

HASIL

Eksplanasi

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Komunikasi yang dibangun dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap objek kebijakan tersebut, sebagai upaya untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.

Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria Evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Wibawa (2002) kinerja pengawasan yang dilakukan belum dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

Salah satu hal yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah belum dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah kabupaten Kampar terkait adanya pungutan pajak burung walet di wilayah Kabupaten Kampar, Khususnya Di Kecamatan Kampar Utara.

Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Kepatuhan merupakan tahapan dalam mencari tahu apakah tindakan yang dilakukan petugas dalam pengawasan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan kebijakan atau aturan yang ditetapkan pelaku usaha atau pemilik penangkaran

sarang burung walet harus patuh terhadap aturan untuk menciptakan keadaan yang sejahtera. Kepatuhan dapat disimpulkan bahwa SOP Pajak Sarang Burung Walet belum dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

Audit

Audit Merupakan tahapan mencari tahu apakah pengawasan dalam usaha penangkaran sarang burung walet telah dilakukan terhadap objek pengawasan, serta melihat penyimpangan dan kebocoran yang terjadi dalam pengawasan, sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja mekanisme pengawasan, evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituentnya, sejauh mana tujuan dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Audit atau pengawasan telah terjadi miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Akunting

Dalam tahap ini Evaluasi dituntut untuk mengetahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang maksimal, yang mengakibatkan pertumbuhan penangkaran sarang burung walet sangat pesat khususnya di Kecamatan Kampar Utara tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Namun Sarang Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pemungutan pajak burung walet tersebut dilakukan secara efektif

Kurangnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap penakaran sarang burung walet ini pun sering dimanfaatkan oleh pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kampar. Usaha penangkaran sarang burung walet tanpa pengawasan dari pemerintah ini pun terus berkembang dan meningkat jumlahnya dari hari kehari tanpa memperhatikan kondisi di sekitar, usaha ini sangat me-

nguntungkan bagi pelaku usaha namun berdampak negatif bagi masyarakat, dari segi ekonomi dapat menimbulkan pertumbuhan yang positif karena harga jual dari usaha sarang burung walet tersebut sangat menjanjikan dimana untuk kualitas A di bandrol dengan harga 9-13 juta perkilo, sedangkan untuk golongan B sekitar 6-8 juta perkilo, namun disisi lain karena usaha tersebut belum didampingi atau dibimbing oleh pemerintah dengan baik yang ditandai dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah belum maksimal menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet.

Pertumbuhan penangkaran sarang burung walet sangat pesat khususnya di Kecamatan Kampar Utara tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Namun Sarang Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pemungutan pajak burung walet tersebut dilakukan secara efektif.

PEMBAHASAN

Evaluasi dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka oleh karenanya evaluasi perlu dilakukan, tetapi adalah penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya: evaluasi harus mengusahakan terjadinya hal-hal atau faktor-faktor penghalang dalam aktivitas-aktivitas yang direncanakan yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah Faktor Internal, pada lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan tugas peraturan daerah kabupaten Kampar nomor

10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Kurangnya tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena belum terciptanya budaya evaluasi. Dalam pengawasan yang merupakan aplikasi dari aktivitas evaluasi terhadap peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Pengawasan atau evaluator yang dilakukan dalam penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet belum terlaksana dengan baik

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang mendukung dalam kelancaran proses pengawasan, karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan, pelayanan yang berkualitas baik dapat menekan pertumbuhan penangkaran sarang burung walet yang tidak memenuhi standard dan sebaliknya jika pengawasan yang dilakukan belum maksimal; Faktor Eksternal; selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam pengimplementasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, bahwa kerjasama yang seharusnya ada di bagian hukum bupati Kampar sebagai pembuat kebijakan dengan dinas pendapatan daerah sebagai pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Kerjasama akan terbentuk jika adanya koordinasi antara kedua dinas terkait, karena kedua dinas memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Untuk melihat bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh bagian hukum bupati Kampar sebagai pembuat kebijakan dengan dinas pendapatan daerah sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu masalah lain juga berasal dari luar organisasi faktor-faktor yang berasal dari pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mengikuti aturan tentang izin penangkaran sarang burung walet, dimana terdapat beberapa penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin, karena mereka beranggapan

bahwa hal tersebut tidak perlu disamping itu sebagian penangkaran sarang burung walet tidak tahu menahu tentang adanya peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet

Widodo (2010) menjelaskan, bahwa tahap akhir dalam evaluasi kebijakan adalah membuat keputusan nasib dari kebijakan publik. Alternatif nasib kebijakan publik antara lain meliputi: Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan, Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan, Kebijakan program atau proyek perlu direplikasikan di tempat lain atau memperluas berlakunya proyek, Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar perlu diteruskan dengan suatu perbaikan, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai pihak yang menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait adanya aturan tentang pajak sarang burung walet. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga harus melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap penakar sarang burung walet dengan turun langsung ke lapangan supaya pajak sarang burung walet dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus melakukan pendataan secara maksimal dan kontinyu agar potensi penerimaan pendapatan asli daerah lebih optimal. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah harus bertindak tegas bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah.

rah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet harus berkoordinasi/komunikasi dengan baik agar tidak terjadi miss komunikasi dalam melaksanakan tugasnya

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan ternyata kinerja pengawasan yang dilakukan belum dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin. disamping itu adanya faktor internal kendala keterbatasan personal dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data yang update, selain faktor internal, faktor eksternal juga mempunyai kendala yaitu kurangnya kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan, kerjasama yang seharusnya ada di dalam organisasi juga mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Nugroho D. Riant 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu